BAB IV
PETA POLITIK ISLAM
PADA MASA PEMERINTAHAN B. J. HABIBIE

A. Perkembangan Politik Islam Pada Masa Pemerintahan Habibie

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak lah singkat, sebagai sebuah bangsa kita pernah berjaya dan memegang peran penting dalam perekonomian dan politik global. Sebagai sebuah negara kesatuan republik Indonesia benar kalau dimulai dengan adanya Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta yang mengatasnamakan bangsa Indonesia. Sejak saat itulah kedaulatan negara Indonesia mulai diakui oleh negara-negara sahabat. Perjalanan pemikiran politik Indonesia sudah dimulai pada era sebelum kemerdekaan, melalui gerakan-gerakan intelektual muda yang menginginkan persatuan dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialsme. Lahirlah banyak perkumpulan atau organisasi nasional maupun regional yang bertujuan satu, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.[1]

Pada era ini peran dari Amien Rais sangat dominan, dia salah satu tokoh yang menggerakan massa untuk aksi turun jalan menuntut Soeharto mundur. Sebagai tokoh Reformasi dia menjadi sangat sibuk pada era ini, dia membentuk sebuah partai islam yang berafiliasi dengan Muhamadiyah, PAN. Dia juga berusaha menghubungkan tokoh nasional pada waktu itu, Gus Dur dan Megawati. Untuk mempersiapkan agenda reformasi yang dikhawatirkan

[1] http://www.kompasiana.com/ (27 Juni 2013 21:56:08) diakses pada tanggal 29 Juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dikuasai oleh rezim Orde Baru. Setelah pemilihan umum tahun 1999, dia juga tokoh yang membuat poros tengah di parlemen, sebuah poros yang menggabungkan kursi-kursi partai Islam untuk mengusung presiden. Pemilu itu dimenangkan oleh PDIP yang dipimpin oleh Megawati, dengan demikian harusnya menjadi sangat gamblang bahwa megawati adalah presiden selanjutnya melalui penetapan MPR.

Era Reformasi yang sering disebut sebagai era keterbukaan dan kebebasan politik telah menciptakan sebuah kondisi yang mendukung bangkitnya kembali politik Islam dan tumbuhnya gagasan-gagasan tentang formalisasi syariat Islam di Indonesia.[2]

Pada masa pemerintahan Habibie menunjukkan terjadinya kebangkitan politik Islam dan tumbuhnya kembali gagasan-gagasan tentang formalisasi syariat Islam di Indonesia pada era Reformasi setidaknya dapat dilihat dari empat indikator, yaitu:

1) Munculnya ormas Islam pendukung gerakan formalisasi syariat Islam,
2) Berdirinya partai-partai Islam,
3) Adanya tuntutan pemberlakuan Piagam Jakarta dalam konstitusi,
4) Munculnya gerakan penegakan syariat Islam di Daerah.[3]

---

[2] Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam: teori dan praktik di Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu.2013), 93.

[3] Zudi Setiawan, *Dinamika Pergulatan Politik dan Pemikiran Formalisasi Syariah Pada Era Reformasi.* (Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional, Spectrum Vol. 5, No. 2, Juni 2008), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat indikator tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi fenomena kebangkitan agama (Islam) secara formal maupun simbolik di dalam perpolitikan nasional.

Pendirian partai Islam marak, diantaranya ada 42 partai Islam 2 partai tidak memenuhi syarat pendaftaran (dikualifikasi) dan 5 partai Islam sengaja tidak mendaftarkan ke Depkeh partai dari 48 partai politik yang menjadi peserta pemilu 1999.[4] Diantaranya, PKB, PAN, PPP , PUI (Partai Umat Islam), PKU (Partai Kebangkitan Umat), Partai Masyumi Baru, PSII (Partai Syarikat Islam), PSII 1905 (Partai Syarikat Islam 1905), partai KAMI, PAY, Masyumi (Partai Politik Islam Masyumi), PBB, PK, PNU (Partai Nahdlatul Ulama'), dan PP (Partai Persatuan). Kemudian dari 35 partai Islam yang mendaftarkan ke LPU diseleksi dan dikerucutkan menjadi 20 partai Islam.[5]

Kemunculan partai-partai Islam dan partai-partai lain yang mempunyai kekhususan Sebanding dipahami sebagai reaksi atas tatanan politik monolitis yang tidak memberikan keragaman ciri dan aspirasi (seperti kebijakan asas tunggal), kemudian kemunculan partai-partai Islam dengan seluruh kekentalan bahasa dan simbolisme politik mereka.

Menjamurnya partai Islam di masa reformasi merupakan refleksi kemajemukan umat Islam dan keberagamaan kepentingan kelompok Islam. Kelahiran partai-partai Islam merupakan buah kebebasan politik yang tak

---

[4] Salim, Arskal, *Partai Islam dan Relasi Negara.* (Jakarta: Kerjasama Puslit IAIN Syarif Hidayatullah dengan The Asia Fundationdan JPPR, 1999), 12 dalam Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam: teori dan praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu.2013) , 95.
[5] Ibid., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terelakkan dari proses reformasi. Proses reformasi yang terjadi memang memberikan angin segar kebebasan bagi warga negara untuk berserikat dan berkelompok yang selama 30 tahun lebih terkungkung oleh kekuasaan *absolut* sentralistik.

Berdasarkan politik aliran itu, menurut Bahtiar, akan terjadi dua pengelompokan politik besar, Pertama, kelompok Islam santri, yang banyak mendominasi berbagai partai Islam, akan berdiri di belakang Habibie, sedangkan kelompok abangan/priyayi akan mengelompok di belakang Megawati Seokarnoputri, Berdasarkan politik aliran ini, pemimpin yang riel akan bertarung hanyalah Habibie versus Megawati, Pemimpin lain akan mendukung dari belakang sesuai dengan politik aliran masing-masing.

Namun William Liddle memberikan perspektif lain, Di era reformasi ini, Liddle melihat munculnya benturan di luar politik aliran, yaitu antara PDI-Perjuangan, PKB dan PAN di kubu reformasi melawan Golkar, yang dibantu oleh PPP dikubu *konservatif/status quo*. Berdasarkan politik aliran, jelaslah PAN, PKB dan PDI-Perjuangan berbeda satu sama lain, PAN dari Islam modernis, PKB dari Islam tradisionalis dan PDI-Perjuangan dari abangan dan kaum nasionalis, Kenyataannya mereka dapat bersatu dalam sebuah kelompok reformasi.[6]

[6] Denny J.A *Jatuhnya, Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia* (Yogyakarta : LKIS. 2006) 64-65 dalam www.idsejarah.net diakses pada tanggal 29 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pemilu yang berhasil dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999, yang memperebutkan 469 kursi di Dewan Perwakilan rakyat (DPR).[7] Setelah melalui proses yang panjang dan dinamis disepakati beberapa hal yang terkait dengan sistem pemilu 1999, diantaranya:

1. Pemilu menggunakan sistem proporsional dengan sistem stelsel yang terdaftar
2. Penyelenggara pemilu adalah KPU sebagai lembaga independen (anggota KPU terdiri atas unsur partai politik peserta pemilu) masing-masing partai memberikan 1 wakil dalam pemilu dan lima wakil dari pemerintah.
3. Pemilih adalah warga Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah, termasuk tahanan politik (Tapol) .
4. Semua partai memiliki kedudukan yang sama dalam melaksanakan kampanye, partai politik dilarang menerima dana dari pihak asing dan dana kampanye harus diaudit oleh akuntan publik kemudian hasilnya dilaporkan oleh KPU 15 hari sebelum pemilihan umum.[8]

Pemilu pada tahun 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik merupakan pertarungan yang besar bagi partai penguasa Orde Baru, yaitu Golkar. Partai yang mendapatkan klaim sebagai partai penyokong Soeharto harus berhadapan dengan partai-partai baru yang dipimpin oleh tokoh-tokoh

---

[7] M. C. Riclefs, *Sejarah Indonesia modern 1200-2008 Edisi IV* (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi. 2009) 709.

[8] Asfar, Muhammad, *Pemilu dan Perilaku Memilih1955-2004* (Surabay: Pustaka Eureka. 2006). 54-55 dalam Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam: teori dan praktik di Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu.2013), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

reformasi. Jumlah partai yang mengalami peningkatan, dari tiga partai menjadi ratusan partai dengan berbagai ideologi yang berbeda.

Dari perbedaan ideologi inilah yang berdampak pada partai Islam yang jumlahnya juga beragam, yang dapat menimbulkan konflik dalam perebutan masa. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi hasil pemilu pada tahun 1999, di mana partai Islam di bawah 30 persen dan perolehan suara ini belum bisa melampaui hasil pemilu pada 1955 yang mencapai 43 persen.

Pada pemilu tahun 1999 partai Islam dapat digolongkan menjadi 3 golongan, diantaranya: golongan pertama (*Major Parties)*, golongan kedua (*Medium-sized parties*) dan yang ketiga (*Small- Group parties)*.[9]

Golongan pertama ialah Partai utama (*Major Parties*) yaitu partai Islam yang meraih suara mayoritas dibandingkan partai Islam lainnya, partai yang masuk dalam golongan ini ada tiga diantaranya: PKB, PPP, dan PAN. Untuk kelompok kedua atau yang disebut partai menengah (*Medium-sized parties*) yaitu partai yang meraih suara luas secara nasional dan mendapatkan kursi di DPR RI (minimal 1 kursi) tetapi tidak termasuk dalam tiga partai besar, partai yang masuk dalam golongan kedua diantaranya PK, Partai NU, PP, PPI Masyumi. PSSI dan PKU. Dan golongan ketiga (*Small- Group parties*) adalah partai yang mampu meraih suara di berbagai provinsi tetapi belum cukup untuk mendapatkan kursi di DPR RI. Partai yang masuk dalam

[9] Klasifikasi faith, 2015 dalam Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam: teori dan praktik di Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu.2013) 109-110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golongan ketiga ini adalah KAMI, PUI, PIB, Partai SUNI, PSII 1905, Masyumi Baru (PMB), PID dan PUMI.

Pada masa reformasi, kehidupan politik Indonesia berjalan mengarah kepada hal yang lebih baik jika dibandingkan dengan masa Orde Baru. Hal ini dapat dilihat dari adanya sistem kepartaian yang baru. Sistem kepartaian baru disebut kokoh dan adaptable apabila sistem tersebut mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan nasional baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Dari sudut pandang ini, jumlah partai hanya akan menjadi penting bila ia mempengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi politik.[10]

B. Peta Gerakan Politik Islam pada Masa B. J. Habibie

Kemunculan partai-partai politik Islam yang telah menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran. Selain apa yang telah dikemukakan, runtuhnya rezim Orde Baru juga telah diikuti dengan kemunculan sejumlah organisasi Islam. Tampaknya, terbukanya kotak Pandora tidak hanya mendorong lahirnya partai-partai politik, tetapi juga munculnya berbagai Ormas.[11]

Seiring dengan kebebasan yang diberikan rezim Habibie, ormas-ormas Islam semakin menunjukkan momentumnya untuk melakukan gerakan memperjuangkan aspirasi Islam secara radikal. Berbeda dengan partai-partai

[10] www.idsejarah.net/2014/12/sejarah-partai-politik-pada-masa diakses pada tanggal 30 Juli 2016

[11] Bactiar effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Democracy Project. 2011). 433

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, kelahiran ormas-ormas tersebut bukan merupakan respons langsung terhadap transisi demokrasi Indonesia. Sebaliknya, kelahiran mereka lebih merupakan reaksi terhadap kondisi sosial-keagamaan dan politik yang berkembang selama periode transisi, yang menurut mereka tampaknya tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam atau kepentingan kaum Muslim.[12]

Pada masa transisi ini banyak ormas-ormas Islam yang memberikan respon positif terhadap kebijakan sistem multi partai yang dikeluarkan pada masa pemerintahan B. J. Habibie, diantarnya:

---

[12] Lihat, *Penelitian Radikalisme Agama dan Perubahan Sosial di DKI Jakarta*,(Pusat Budaya dan Bahasa (PBB) dan Pemda DKI Jakarta, 2000) dalam Bactiar effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Democracy Project. 2011). 435

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Muhammadiyah

Organsiasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 dengan pendirinya KH A. Dahlan atas saran murid-muridnya dan beberapa anggota Boedi Oetomo untuk mendirikan organisasi yang bersifat permanen.[13] Organisasi ini bertumpu pada cita-cita agama sebagai aliran Islam modernis yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi umat Islam Indonesia. Agama Islam di Indonesia pada waktu itu tidak utuh dan murni karena pemeluknya terkungkung dalam kebiasaan yang menyimpang dari al-Qur'an dan hadis. Keadaan ini tidak menumbuhkan simpatik pada pemeluknya, lebih-lebih dari kalangan muda yang sudah mendapat pendidikan Barat. Bahkan mereka menganggap bahwa Islam dianggap sebagai penghambat kemajuan bangsa. Hal inilah yang mendorong KH. A. Dahlan untuk mendirikan Muhamamdiyah dengan tujuan untuk membersihkan berbagai ajaran yang jauh dari Islam seperti perbuatan musyrik, bid'ah dan lain-lainnya.[14]

Perjuangan yang khas yang dilakukan Muhammadiyah adalah pendidikan walaupun dibidang lainnya seperti sosial dan keagamaan juga menjadi perhatian. Dari pembaharuan dibidang pendidikan inilah Muhammadiyah berhasil mencetak manusia muslim yang berbudi luhur, alim, luas pengetahuannya, dan paham masalah dunia dan agama. Sistem pendidikannya dibangun dengan menggabungkan cara tradisional dan modern, dari madrasah sampai perguruan tinggi. Muhammadiyah menjadi

[13] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1990-1942*, (Jakarta : LP3ES, 1985), 84.
[14] Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerakan Islam yang menggabungkan antara iman dan kemajuan, sehingga umat Islam tidak ketinggalan dalam dunia yang modern ini.

Begitu banyak peranan Muhammadiyah yang telah mewarnai kehidupan di Indonesia ini diantaranya dibidang politik. Penelitian ini berusaha mengungkapkan peranan Muhammadiyah dibidang politik pada masa kontemporer, terutama perilaku politik Muhammadiyah pada era reformasi melalui Partai Amanat Nasional (PAN) tahun 1998-2000.[15]

2. Nahdlatul Ulama (NU)

Transisi kekuasaan pada era Habibie telah mengubah konfigurasi politik Indonesia secara fundamental. Konfigurasi politik tersebut adalah tampilnya partai politik dengan berbagai basis ideologi, baik agama maupun non agama.[16]

Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut Era Reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air.[17]

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26-28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun

[15] http://mediapublikonline.blogspot.co.id (diakses pada tanggal 17 Agustus 2016)
[16] http://smknukeren.blogspot.co.id/2016/05/peran-nu-di-era-reformasi.html (diakses pada tanggal 17 Agustus 2016)
[17] http://www.dpp.pkb.or.id/sejarah-pendirian (diakses pada tanggal 18 Agustus 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu:

a. Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik,
b. Mabda' Siyasi,
c. Hubungan Partai Politik dengan NU,
d. AD/ART
e. Naskah Deklarasi.

Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa.

3. Kelompok Islam Moderat

Perkembangan politik umat Islam maupun politik nasional mengalami perubahan yang sangat cepat ketika datang gelombang gerakan reformasi yang meruntuhkan rezim Orde Baru. Ledakan partisipasi politik dengan mendirikan partai politik baru di era reformasi untuk bertanding di Pemilu 1999 telah melahirkan konfigurasi politik baru, sehingga bermunculan partai politik yang membawa aspirasi umat Islam, baik itu yang memakai asas formal Islam maupun yang membawa kepentingan umat Islam.

Pada reformasi, ketika setiap orang berpeluang mengekspresikan kecenderungannya, baik berpolitik maupun menuangkan pemikiran secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbuka, maka ustadz Abu Ridla bersama teman-temannya yang concern dengan kegiatan kampus, melakukan diskusi yang pada akhirnya melahirkan satu pemikiran untuk membikin partai politik -yang kemudian kita kenal dengan nama Partai Keadilan (PK)[18]

Partai Keadilan didirikan dengan suatu keputusan yang diambil berdasarkan survei yang dilakukan kepada aktifis gerakan dakwah kampus diseluruh Indonesia. Intinya diadakan jejak pendapat (polling) kepada mereka untuk mengetahui asprirasi para aktifis dakwah tersebut sebagai suatu respon adanya era reformasi yang sedang "booming" di Indonesia pada saat itu. Adapun pertanyaan yang muncul pada jejak pendapat itu adalah bentuk apakah yang akan diambil oleh gerakan dakwah ini untuk muncul kehadapan publik di era reformasi. Apakah dalam bentuk Organisasi Massa (ORMAS), Organisasi Politik (ORPOL), atau dalam benuk yang sama selama ini yaitu dalam bentuk yayasan dan lembaga-lembaga. Demi mengaktualisasikan pemikiran dan dakwah. Parpol ini merupakan sarana aplikasi dan aktualisasi dalam berdakwah.

Dakwah tidak semata-mata hanya di kampus, tapi juga harus disosialisasikan di Legislatif dengan harapan agar dakwah didengar juga oleh politikus yang akan menyusun atau menentukan kebijakan Negeri ini.[19]

---

[18] http://pks.or.id/content/sejarah-ringkas (diakses pada tanggal 18 Agustus 2016)

[19] http://www.landasanteori.com/2015/10/sejarah-berdirinya-partai-keadilan.html (diakses pada tanggal 18 Agustus 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini menunjukkan bahwa ormas-ormas Islam memberikan respon positif terhadap kebijakan presiden pada era reformasi. Terlepas dari kenyataan bahwa organisasi-organisasi tersebut memiliki kepedulian yang sama, namun tidak dapat disimpulkan bahwa mereka sepakat dalam seluruh aspek yang berkaitan dengan penerapan syariah Islam. misalnya, lebih-lebih yang diwakili oleh NU dan Muhammadiyah yang memiliki struktur organisasi yang sudah sangat mapan. NU dan Muhammadiyah yang tumbuh dan berkembang sebagai gerakan dakwah dan pendidikan yang sangat mengakar di tengah masyarakat. Keduanya adalah gerakan (sosio) kultural, dan bukan gerakan politik (struktural), oleh karena itu keduanya memiliki tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi dalam berhadapan dengan berbagai dinamika politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id